

# BEST PRACTICES OF OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP LOCAL INDONESIA AND THE CLOSING OF OG WEEK 2021

MAY 21, 2021



Pada tanggal 21 Mei 2021, Sekretariat OGI menyelenggarakan webinar "Best Practice Open Government Partnership Local Indonesia", webinar ini sekaligus menjadi acara penutup OG Week yang telah berlangsung dari tanggal 17 Mei 2021. Dalam webinar kali ini Sekretariat OGI mengundang empat dari lima pemerintah daerah yang terpilih menjadi anggota Open Government Partnership Local (OGP Local) untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai praktik baik yang telah dilakukan masing-masing daerah. Pemerintah daerah yang diundang kemudian mengirimkan perwakilannya untuk memaparkan praktik baik yang telah dilakukan.

Thursday, May 20, 2021, is the fourth day of a series of events for Open Government Week Indonesia in 2021. Today, Open Government Indonesia (OGI) together with United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) held a webinar with the title "Local Government Innovation in To Increase Accountability through Digital Governance". This webinar was held with the main objective to find out the innovations made by several mayors (Semarang, Makati and Cauayan) in increasing the accountability of their government through digital governance.

Pembicara pertama adalah Bapak Iswandi Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau menjelaskan bahwa keikutsertaan NTB dalam OGP Local sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi NTB yaitu mengembangkan kerja sama dan mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur instansi pemerintah maupun masyarakat sipil dalam proses pembangunan daerah. Adapun praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemprov NTB adalah:

### 1. Program NTB Satu Data

NTB Satu Data adalah penyelenggaraan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagikan.

### 2. NTB Care

NTB Care adalah sistem yang menjadi mata telinga dan tangan Pemerintah Daerah di NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat kepada pemerintah secara *real time* tanpa melalui prosedur protokoler sehingga dapat menghemat waktu. NTB Care melayani pengaduan layanan publik, pengaduan dugaan pelanggaran (*whistle blower system*), aspirasi masyarakat, saran, informasi strategis/unggulan program pemerintah, *polling index* persepsi kepuasan masyarakat.

### 3. Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi posyandu menjadikan posyandu multiguna tidak hanya melayani kebutuhan bayi saja tetapi juga melayani semua anggota keluarga dalam bentuk posyandu kesehatan ibu dan anak, posyandu remaja, dan posyandu lansia, serta untuk deteksi dini berbagai persoalan sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun. Tiap tahun jumlah posyandu keluarga yang aktif terus mengalami peningkatan.

The first speaker was Iswandi, the Head of the Bappeda of West Nusa Tenggara Province. He explained that NTB's participation in OGP Local was in line with the vision of the NTB Province, namely to develop cooperation and encourage the participation of various stakeholders, both from government agencies and civil society for the sake of regional development process. The good practices that have been implemented by the NTB Province are:

### 1. One Data NTB

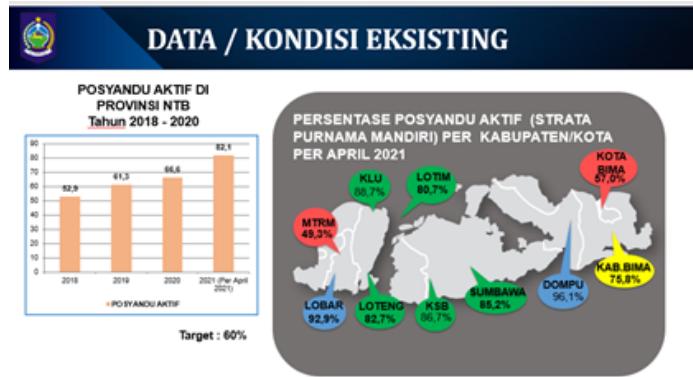
One data NTB is the implementation of data management to produce data that is accurate, up-to-date, integrated, accountable, and easy to access and share.

### 2. NTB Care

NTB Care is a system that becomes the eyes, ears, and hands of the Regional Government NTB to capture, understand and respond to public complaints to the government in real-time. NTB Care serves complaints on public services, complaints of alleged violations (whistleblower system), public aspirations, suggestions, strategic information/superior government programs, polling index of community satisfaction.

### 3. Revitalizing Posyandu

The revival of the posyandu to add the purposes of posyandu. Posyandu will not only serve the needs of infants but also all family members in the form of maternal and child health posyandu, youth posyandu, and elderly posyandu, as well as for early detection of various social problems as the crucial community services. Every year the number of active posyandu continues to increase.

**Gambar 1 Statistik Program Revitalisasi Posyandu**

Source: Iswandi's Presentation

Pembicara kedua adalah Bapak Ramli Tongko selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperlitbangda) Kabupaten Banggai. Beliau menjelaskan bahwa terpilihnya Kabupaten Banggai di OGP Local merupakan amanah bagi Pemkab Banggai untuk semakin menerapkan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi, inklusi dll. Praktik baik sesuai nilai OGP yang telah di lakukan di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

#### 1. Posyandu Pra Konsepsi

Pelayanan untuk meningkatkan status gizi ibu atau calon ibu sebelum terjadinya konsepsi, memberikan edukasi mengenai hal-hal yang dapat memperburuk kesehatan ibu dan anak, memperbaiki kondisi kesehatan ibu serta anak. Bapak Ramli mengatakan bahwa penurunan angka stunting di Kabupaten Banggai cukup drastis namun persoalan saat ini adalah kematian ibu hamil yang meningkat di masa pandemi karena kurangnya kontak dengan posyandu pra konsepsi. Oleh karena itu, Pemkab Banggai mengembangkan aplikasi SPM Online Ibu Hamil agar ibu hamil di Banggai bisa tetap mendapatkan pelayanan posyandu pra konsepsi.

The second speaker was Ramli Tongko as the Head of Bapperlitbangda Banggai Regency. He explained that the election of the Banggai Regency in OGP Local is a mandate for the Banggai Regency Government to increasingly apply the values of transparency, participation, inclusion, etc. Good practices according to OGP values that have been implemented in Banggai Regency are as follows:

#### 1. Preconception Posyandu

Services to improve the nutritional status of mothers or prospective mothers before conception, provide education about the aspects that can worsen maternal and child health, and improve maternal and child health conditions. Although the decline in the stunting rate in Banggai Regency was quite drastic, maternal mortality increases during the pandemic due to lack of contact with pre-conception posyandu. Therefore, the Banggai Regency Government has developed an online application for pregnant women so that they can continue to receive pre-conception posyandu services.

## 2. Pinasa

Pinasa adalah gerakan moral agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Program ini membuat Kabupaten Banggai mendapatkan piala adipura pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Program ini kemudian dikembangkan sendiri oleh masyarakat dengan membuat sub program seperti pinasa bersama gerakan lorong asri, pinasa bersih sungai, pianasa cinta lingkungan dll.

## 3. Banggai Satu Data

Banggai Satu Data merupakan program untuk mendukung program nasional guna menyediakan data yang akurat, valid, lengkap demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan informatif. Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan atau transformasi menuju banggai satu data.

## 4. Program Family Farming

Pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk membuat sistem pertanian yang terintegrasi sehingga dapat menanggulangi kemiskinan dan menambah ketahanan pangan.

Pembicara ketiga adalah Bapak Benny Tanaya sebagai Staf Ahli Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Pak Benny memaparkan bahwa praktik baik yang ada di KSB pada pokoknya bersumber dari satu program yaitu Program Pemberdayaan Gotong Royong. Implementasi Program Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dulunya tidak berjalan dengan baik karena belum dikelola dengan serius. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah KSB merevitalisasi dan memformalkan tata nilai dan semangat gotong royong sebagai pedoman pembangunan dan program unggulan daerah melalui komitmen politik dalam bentuk: PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD KSB Tahun 2016-2021, PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Program Pemberdayaan Gotong Royong di bagi atas 3 ruang lingkup:

## 2. Pinasa

Pinasa is a moral movement not to litter, and to keep the environment clean. Through this program, the Banggai Regency got awarded the Adipura trophy in 2017, 2018, and 2019. Later on, the community developed Pinasa by creating sub-programs such as pinasa with the beautiful alley movement, clean river pinasa, environmental-loving pianasa, etc.

## 3. One Data Banggai

One Data Banggai is a program to support national programs to provide accurate, valid, complete data to realize an open and informative government. Currently, Banggai Regency is still in the stage of development or transformation towards one database.

## 4. Family Farming Program

This program is utilizing house yard land to create an integrated agricultural system so that it can reduce poverty and increase food security.

The third speaker was Benny Tanaya as Expert Staff of the Regent of West Sumbawa Regency. Benny explains that in West Sumbawa Regency the good practices that exist come from one program, namely the Gotong Royong Program. At first, the implementation of the gotong-royong empowerment regional program in West Sumbawa Regency (KSB) did not go well because it had not been managed seriously by the former government. Then in 2016, the KSB Government revitalized and formalized the values and spirit of gotong-royong as development guidelines and regional superior programs through political commitment in the form of : PERDA Number 8 of 2016 concerning RPJMD KSB 2016-2021, and PERDA Number 3 of 2016 concerning Regional Programs for Mutual Cooperation Empowerment. The Mutual Cooperation Empowerment Program is divided into 3 scopes:

1. Gotong Royong Mandiri yang memiliki jenis kegiatan :

- Perbaikan/pembersihan prasarana umum seperti: masjid/mushola, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman umum, dan pantai wisata;
- Perbaikan/pemeliharaan gorong-gorong skala lingkungan;
- Pembuatan/perbaikan saluran drainase lingkungan;
- Pembuatan/perbaikan infrastruktur pertanian skala kecil seperti: saluran irigasi cacing, pagar usahatani, penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat (siskamling);
- Pembuatan/perbaikan fasilitas umum skala kecil lainnya.

2. Gotong Royong Stimulan memiliki jenis kegiatan:

- Pembuatan jamban bagi rumah tangga tidak mampu;
- Pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
- Pembuatan pintu air saluran irigasi.
- Pembangunan balai pertemuan;
- Rehab rumah tidak layak huni (Rehab RTLH);
- Pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi, serta petani-nelayan-peternak miskin (KARTU BARIRI);
- Diskusi, seminar dan workshop pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS);
- Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
- Pembangunan/penyediaan fasilitas/Pembangunan sosial ekonomi lainnya seperti: Lansia, PMKS, Disabilitas (KARTU PARIRI).

3. Gotong Royong Padat Karya memiliki jenis kegiatan:

- Pembangunan badan jalan atau pembukaan jalan dan jembatan baru;
- Pembangunan jalan usahatani;
- Pembersihan Danau Lebo' Taliwang;
- Pembangunan/normalisasi prasarana irigasi dan prasarana ekonomi pertanian lainnya;
- Pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan;
- Pembangunan fasilitas umum lainnya.

1. Gotong Royong Mandiri which has the following types of activities:

- Repair/clean public infrastructures such as mosques/musholla, parks, markets, terminals, public cemeteries, and tourist beaches;
- Repair/provide of environmental water tunnels;
- Support the construction/repair the environmental drainage channels;
- Support the construction/improvement of small-scale agricultural infrastructure such as irrigation canals, farm fences, enforcement of public security (siskamling);
- Support the construction/repair of other small-scale public facilities.

2. Gotong Royong Stimulan has the following types of activities:

- Construction of latrines for poor households;
- Construction of water tunnels in the environment;
- Construction of flood gates.
- Construction of meeting halls;
- Repair of uninhabitable houses (RTLH Rehab);
- Empowerment of micro and small business actors (UMK), as well as poor farmers-fishermen-breeders (KARTU BARIRI);
- Discussions, seminars, workshops on education, science, technology, and the arts;
- Mass health services.

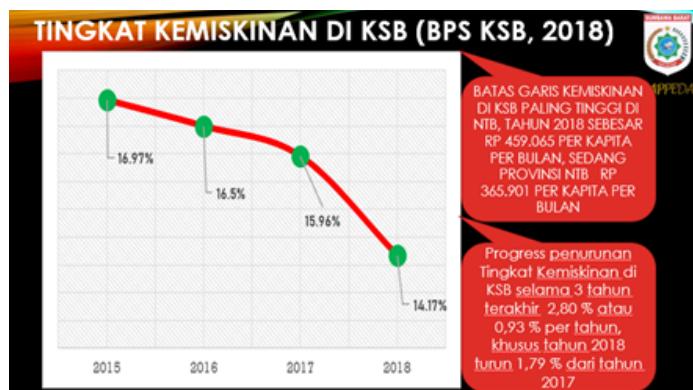
3. Intensive Mutual Cooperation has the following types of activities:

- Construction of road or opening of new roads and bridges;
- Construction of farm roads;
- Lebo' Taliwang Lake Cleaning;
- Development/normalization of irrigation infrastructure and other agricultural economic infrastructure;
- Construction/maintenance of environmental roads;
- Construction of other public facilities.

Pak Benny menerangkan bahwa pemberdayaan lain yang dilakukan Pemkab Sumbawa Barat adalah pemberian santunan untuk lansia, bantuan pengadaan alat tangkap atau kebutuhan lain untuk nelayan, pemberian kemudahan bagi petani untuk membuat sertifikat tanah, Pemberian bantuan modal untuk UMKM di Sumbawa Barat. Dengan program-program ini pada tahun 2018 Pemkab Sumbawa Barat bisa menekan angka kemiskinan hingga satu digit.

Benny explains that other empowerments carried out by the West Sumbawa Regency Government are providing compensation for the elderly, assistance in procuring fishing gear or other necessities for fishermen, providing easy mechanism for farmers to make land certificates, and providing capital assistance for micro and small businesses in West Sumbawa. By having these programs in 2018, the West Sumbawa Regency Government was able to reduce the poverty rate to one digit.

**Gambar 2 Tingkat Kemiskinan di KSB**



**Sumber: Paparan Bapak Benny Tanaya**

Pak Benny menerangkan bahwa pemberdayaan lain yang dilakukan Pemkab Sumbawa Barat adalah pemberian santunan untuk lansia, bantuan pengadaan alat tangkap atau kebutuhan lain untuk nelayan, pemberian kemudahan bagi petani untuk membuat sertifikat tanah, Pemberian bantuan modal untuk UMKM di Sumbawa Barat. Dengan program-program ini pada tahun 2018 Pemkab Sumbawa Barat bisa menekan angka kemiskinan hingga satu digit.

Benny explains that other empowerments carried out by the West Sumbawa Regency Government are providing compensation for the elderly, assistance in procuring fishing gear or other necessities for fishermen, providing easy mechanism for farmers to make land certificates, and providing capital assistance for micro and small businesses in West Sumbawa. By having these programs in 2018, the West Sumbawa Regency Government was able to reduce the poverty rate to one digit.

Pembicara terakhir adalah Bapak Edy Kusmartono selaku Kepala Bapperlitbangda Brebes. Beliau menyampaikan setidaknya ada dua inovasi unggulan dari Kabupaten Brebes:

#### 1. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)

GKB dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang tidak sekolah sehingga Pemda Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) berinisiatif untuk membuat anak tersebut kembali bersekolah. Pak Edy menjelaskan bahwa semula Pemda Kabupaten Brebes tidak bisa membiayai secara keseluruhan anak yang kembali sekolah karena keterbatasan dana. Namun, sejak tahun 2018 program ini akhirnya mendapat dukungan dari Bupati dan mendapat pembiayaan dari APBD dan APBDes. Dengan GKB Pemda Kabupaten Brebes berhasil mengembalikan sejumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan rincian dalam gambar berikut:

The last speaker was Edy Kusmartono as the Head of Bapperlitbangda Brebes Regency. He stated that there are at least two leading innovations from Brebes Regency:

#### 1. Back to School Movement or Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)

GKB is motivated by the large number of children who are not getting education in school, so the local government of Brebes Regency in collaboration with the Education Care Community Forum (FMPP) took the initiative to encourage these children to return to school. Edy explains that initially, the local government of Brebes Regency could not fully pay for the children who returned to school due to limited funds. However, since 2018 this program has finally received support from the Regent and received funding from the APBD and APBDes. With the GKB, the Brebes Regency Government managed to return many Non-School Children or Anak Tidak Sekolah in Indonesian language (ATS) with details in the following picture:

**Gambar 3 Jumlah ATS yang Berhasil Dikembalikan ke Sekolah**



**Sumber: Paparan Bapak Edy Kusmartono**

Setelah program ini berjalan beberapa tahun Bapperlitbangda Kabupaten Brebes kemudian mengkomparasikan hasil ATS yang kembali ke sekolah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun karena yang disasar adalah anak usia 7-18 tahun, program ini tidak memberikan hasil signifikan kepada IPM sehingga sasaran GKB diperluas dengan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). Harapannya, dengan DTS berkisar usia 12-55 tahun dimasukan ke sekolah formal/non formal, hal ini akan memberikan hasil signifikan kepada IPM. Lebih jauh lagi, GKB yang kini menyasar DTS sebenarnya memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan karena dari bisa memiliki skill untuk bekerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri dari sekolah formal/non formal. Dalam APBD GKB dianggarkan sebesar Rp. 500 juta untuk 300 orang, dan terdapat pula bantuan dari APBDes sebesar Rp. 1,5 Juta untuk setiap orang dengan catatan setiap desa wajib mengirimkan 10 orang anak/dewasa untuk kembali bersekolah.

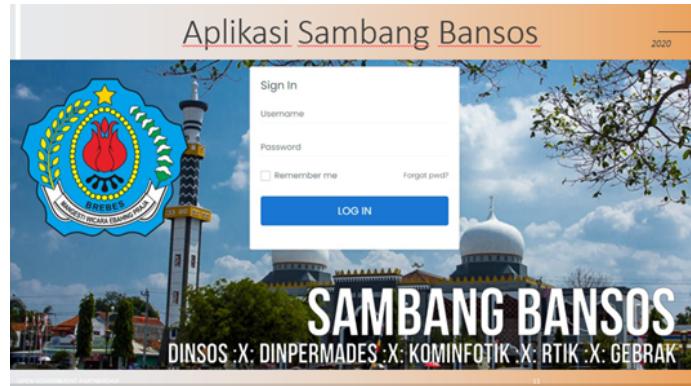
## 2. Sambang Bansos

Sambang bansos adalah program Kabupaten Brebes untuk melakukan pemadaman data bantuan sosial dengan membuat sistem yang berkolaborasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dindukcapil untuk data KK dan NIK, Dinsos untuk data penerima bansos (pusat maupun daerah), Dinkominfo untuk penyedia software dan infrastruktur jaringan. Berdasarkan penuturan dari Pak Edy aplikasi sambang bansos dibuat karena Pemkab Brebes tidak memiliki data penerima bansos yang akurat. Data yang ada semuanya tidak sinkron sehingga terdapat warga yang seharusnya tidak mendapatkan bansos tapi dapat, ada pula yang mendapatkan bansos dari pusat dan daerah sekaligus karena NIK ganda.

After this program has been running for several years, the Brebes Regency Bapperlitbangda then compares the results of ATS returning to school with the Human Development Index (HDI). However, because the target audience is children aged 7-18 years, this program did not provide significant results for HDI so the GKB target was expanded to the adults who did not graduate from school Non-School Adults or Dewasa Tidak Sekolah (DTS). It is hoped that with DTS ranging in age from 12-55 years old to be enrolled in formal/non-formal schools, this will give significant results to the HDI. Furthermore, from formal/non-formal schools DTS will have skills to work or even to create their own jobs. For this program, the Brebes Government budgeted the amount to Rp. 500 million for 300 people, and there is also a budget from the APBDes amount to Rp. 1.5 million for each person with a note that each village is obliged to send 10 children/adults to return to school.

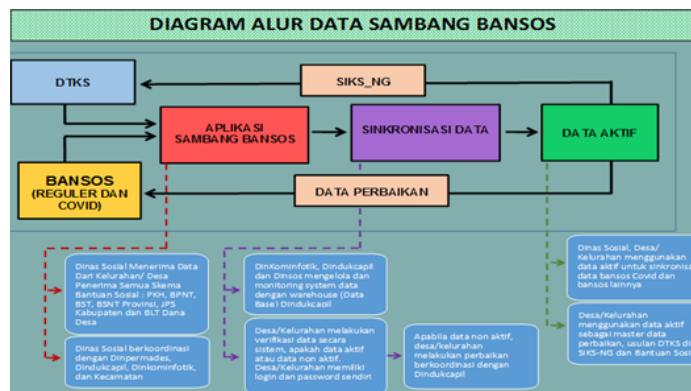
## 2. Sambang Bansos

Sambang Bansos is a program in Brebes Regency that aims to match COVID-19 aid funds recipient data by creating a system that collaborates with several Regional Apparatus Organizations (OPD) such as Disdukcapil for family certificate and ID number data, Dinsos for data on assistance funds recipients (central and regional), Diskominfo for software and infrastructure providers network. Edy stated that Sambang Bansos was developed because the Brebes Regency Government did not have accurate COVID-19 assistance funds recipient data.

**Gambar 4 Aplikasi Sambang Bansos****Sumber:** Paparan Bapak Edy Kusmartono

Pak Edy berharap dengan adanya pemanfaatan data ini dapat menjadi data base bantuan COVID-19 atau bantuan lain, dan program pembangunan lainnya. Sambang bansos kini sudah dibuat aplikasi dan melibatkan OPD Kabupaten Brebes dengan menghasilkan data tunggal Brebes dengan alur data sebagai berikut :

Edy hopes it can become a database for COVID-19 assistance funds or other assistance funds or other development programs. Sambang Bansos has now made an application and involves the Brebes Regency regional organization or organisasi perangkat daerah (OPD) by producing a single data of Brebes with the following data flow:

**Gambar 5 Alur Data Bansos****Sumber:** Paparan Bapak Edy Kusmartono

Data yang sudah melalui alur ini akan menghasilkan data valid yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bansos COVID-19 maupun bansos lainnya di masa mendatang. Pak Edy menambahkan jika data-data ini sudah disinkronisasi selanjutnya akan dimasukan ke dalam Brebes Satu Data. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah belum semua operator memahami penggunaan aplikasi sambang bansos karena pemda belum melakukan pelatihan. Untuk itu, kedepannya Pemda Kabupaten Brebes akan melakukan pelatihan kepada operator.

Memasuki sesi penutupan acara OG Week 2021, Ibu Maharani Selaku Point of Contact OGP for Indonesia menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan OG Week tahun ini Indonesia berhasil menyelenggarakan 16 webinar dan workshop yang diikuti oleh lebih dari 1000 peserta dengan melibatkan 17 OMS, 5 OGP Local, 6 lembaga pemerintah pusat, dan 22 pembicara perempuan. Ibu Maharani juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, organisasi masyarakat sipil (OMS), pemerintah daerah, kementerian, DPR RI, dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan acara OG Week 2021.

Data that has been processed through this flow will produce valid data that can be used as a guide in providing COVID-19 aid funds and other assistance funds in the future. Edy added that if this data has been synchronized, it can be used in the One Data Brebes program. However, the current obstacle is that only a few operators understand how to operate this application because the local government has not conducted the training. Therefore the Brebes Regency Government will conduct training for operators.

As the closing session of the OG Week 2021, Maharani as the OGP Point of Contact for Indonesia presented a summary of this event, OG Week Indonesia has been managed to conducted 16 webinars and workshops attended by more than 1000 participants involving 17 CSOs, 5 OGP Local, 6 institutions central government, and 22 female speakers. Maharani also expresses her greatest appreciation to all participants, civil society organizations (CSOs), local governments, ministries, House of Representatives Republic of Indonesia, and all parties who have been involved in organizing the OG Week 2021 event.